|  |  |
| --- | --- |
| Judul | Strengthening the Political Ethics of Pancasila in Making Good Government |
| Halaman | 5 |
| Tahun | 2018 |
| Penulis | Edi Kusnadi, Mahmud, Eneng Martini |
| Reviewer | Alfito Nur Arafah |
| Tanggal | 15 September 2019 |

REVIEW JURNAL INTERNASIONAL

1. Pendahuluan

Praktek etika politk sangat dibutuhkan demi terwujudnya tata kelola yang baik di Indonesia demi demokrasi yang adil dan beradab sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Karena pada dasarnya etika politik Pancasila memiliki tujuan khusus yaitu sesuai keputusan MPR No. VI tahun 2001 “Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk membentuk pemerintahan yang bersih, efisien,dan efektif, serta menumbuhkan demokrasi suasana politik yang bercirikan oleh keterbukaan, rasa tanggung jawab, responsif terhadap aspirasi orang, menghormati perbedaan, jujur dalam persaingan, kemauan untuk menerima lebih banyak pendapat yang benar, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika mandat pemerintahan yang dimiliki pejabat negara, keinginan yang tinggi dalam menyediakan layanan kepada publik, siap mengundurkan diri jika dirasa dia telah melanggar norma dan sistem nilai atau tidak dapat memenuhi mandat dari masyarakat, bangsa dan negara. Masalah potensial yang dapat menyebabkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara damai dengan pengetahuan penuh dan kebijaksanaan”. Namun tindakan yang menyimpang dari ajaran Pancasila masih saja terjadi seperti penyimpangan pada ketertiban hukum yang terjadi di Indonesia dan perbuatan pejabat publik yang masih saja mengedepankan kepentingan pribadi. Sistem good governance menjadi konsep terbaik. Tetapi praktek di lapangan justru sebaliknya.

1. Tujuan, Obyek dan Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa Pancasila sebagai etika politik dalam membentuk Good Governance. Dan obyek penelitianya adalah Pancasila dengan metode penelitan deskriptif-eksplanatif. Penulis memaparkan pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam sistem politik yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berperan dalam terwujudnya sistem etika politik di negara ini.

1. Pembahasan
   1. Etika Politik Pancasila

Etika adalah cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi standar penilaian moral dan juga pedoman terkait baik buruknya perilaku manusia. Dan Etika Politik adalah adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahasa prinsip-prinsip moralitas politik. Sedangkan Etika Politik Pancasila adalah etika yang berasal dari nilai-nilai luhur Pancasila yang harus menjadi satu-satunya landasan dalam menciptakan mekanisme sistem politik di Indonesia.

* 1. Good Governance

UNDP (United Nation Development Program) menyebutkan bahwa karakteristik yang baik dalam sistem pemerintahan adalah: "legitimasi, kebebasan berserikat dan berpartisipasi dan kebebasan media, adil dan menetapkan kerangka kerja hukum yang ditegakkan tanpa memihak, akuntabilitas birokrasi dan transparansi, informasi yang tersedia secara bebas dan valid, manajemen sektor publik yang efektif dan efisien, dan kerjasama antara pemerintah sipil dengan organisasi masyarakat".

Implementasi dari Good Governance adalah kunci utama untuk mewujudkan aspirasi komunitas dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu, diperlukan pembangunan dan implementasi dari sistem akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih. Dan sistem itu membuktikan bahwa pemerintahan dan pembangunan dapat menjadi efisien, efektif dan bebas korupsi.

* 1. Memperkuat Etika Politik Pancasila demi mewujudkan Good Governance

Untuk memperkuat etika politik Pancasila yang dapat berdampak pada good governance seharusnya dilakukan dari berbagai dimensi termasuk dimensi dari sistem pendidikan, subyek (merevitalisasi sistem pendidikan sipil), pendidikan politik (institusi formal/informal/non formal).

Sistem pendidikan nasional Indonesia tercantum dalam Undang-undang no. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara jelas menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, budaya nasional Indonesia, dan respon terhadap perkembangan jaman. Pancasila sebagai sumber etika politik dan kewarganegaraan, mengharuskan pendidikan etika politik harus dikembangkan atas dasar sejarah. Demikian dengan upaya memperkuat etika politik dengan tata kelola yang baik akan tercapai sebagai cita-cita bangsa Indonesia.

1. Kesimpulan

Secara disadari atau tidak praktek yang terjadi mengarah ke dimensi ruang sebagai nilai bebas, mengesampingkan nilai nilai etika. Sejauh ini praktek politik sudah sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia menandakan kelemahan praktek politik dengan etika politik. Dari segi nilai, moral dan etika dalam politik sangat erat kaitannya satu sama lain. Etika politik harus dipahami sebagai ilmu yang berhubungan dengan prinsip moralitas politik. Jadi nilai-nilai Pancasila berperan dalam sistem etika politik di Indonesia. Namun kelemahan dari etika politik dapat dilihat dari berbagai penyimpangan hukum di Indonesia. Tindakan menyimpang seolah olah menjadi tindakan legal dan dianggap menyimpang meski kita tidak pernah melakukan tindakan menyimpang. Untuk itu perlu adanya penguatan etika politik Pancasila. Dan upaya tersebut adalah, pertama, memperkuat nilai nilai yang terkandung dalam sistem pendidikan nasional. Kedua, merevitalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai inti dari etika politik dan penanaman politik pendidikan untuk warga negara.